

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut Amani (2018), salah satu usahanya yaitu dengan melakukan pembinaan, menumbuhkan dan mengembangkan baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah (UMKM). Begitu pula menurut Astriani, Herawati dan Dewi (2018) bahwa modal utama pembangunan perekonomian Indonesia yaitu bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Peranan UMKM di Indonesia sangatlah besar, karena dalam UMKM ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan usaha ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung melalui data dari Kemenkop dan UMKM pada tahun 2020 bahwa saat ini 99,9% usaha di Indonesia merupakan sektor UMKM yang didominasi pada skala usaha mikro.

UMKM merupakan satu diantara banyak penggerak dalam perekonomian bangsa. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 (Widyastuti, n.d.), UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah upaya ekonomi produktif milik perseorangan yang bukan cabang perusahaan dari usaha Menengah. Jumlah usaha industri UMKM Indonesia salah satu paling banyak di antara Negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun perkembangan UMKM baru terlihat dari sisi jumlahnya saja. Dalam aspek keuangan, hanya sedikit UMKM yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja keuangannya. Hal ini tak lepas dari kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan. Adapun kegiatan penyusunan laporan keuangan, masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya. Akibatnya pelaku UKM tidak mengetahui secara persis berapa pendapatan (kas) yang seharusnya diterima, berapa biaya operasi yang seharusnya dikeluarkan dan berapa yang seharusnya masih tersisa. Walaupun ada perencanaan kegiatan, biasanya tidak tersusun secara tertib sehingga mengalami kesulitan bagaimana cara mengalokasikan dana (kas) yang ada sekarang. Permasalahan itu semakin kompleks seiring dengan semakin besarnya kegiatan usaha UKM.

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Bab I pasal 1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dengan adanya standar akuntansi keuangan yang diakui di indonesia, yang begitu penting perannya dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memajukan perekonomian bangsa. Oleh karna itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai mana dukungan mendorong perkembangan serta pertumbuhan UMKM di indonesia.

Seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akutansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP karena keterbatasan sumberdaya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut. Karna itu, DSAK IAI melakukan pengembangan standar akutansi yang dapat memenuhi kebutuhahn UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuann UMKM di indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai upaya mendukung kamajuan perekonomian di indonesia.

Sesuai dengan adanya perkembangan UMKM dalam melaporkan laporan keuangannya, kini telah ada dikeluarkan Standar Akutansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). Penerapan standar akutansi diharapkan dapat memberi gambaran kinerja manajemen UMKM di masa lalu dan prospek di masa depan, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus maupun oleh anggota UMKM dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan lain yang berhubungan dengan UMKM. Sejak adanya SAK EMKM persepsi dari berbagai pihak muncul sebagai tanggapan atas tingkat efektifitas, efisiensi, tingkat kemudahan maupun kegunaan adanya standar yang baru.

Meskipun cukup ringkas, tidak banyak adanya perubahan dalam prinsip-prinsip umum nya yang telah dilaksanakan saat ini. Dengan adanya standar ini dapat menjadikan acuan yang lebih mudah bagi semua kalangan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Tetapi kenyataannya tingkat kebutuhan SAK EMKM bagi UMKM sangat rendah, SAK EMKM juga masih dianggap memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dikarenakan usaha kecil tidak memiliki pengetahuan tentang akutansi, dan banyak dari mereka belum mengetahui penting pencatatan dan pembukuan bagi usaha mereka. Bagi usaha kecil memandang bahwa proses akutansi tidak terlalu penting untuk diterapkan., sehingga laporan keuangan dalam usaha kecil tersebut terkesan apadanya. Inilah peremasalahan yang terjadi pada UMKM saat ini, khususnya dibidang keuangan. Sehingga masalah tersebut menjadi salah satu kendala dalam perkembangan UMKM.

Tujuan adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang ada dalam posisi keuangan, laporan arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang dapat bermanfaat pada sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta adanya laporan keuangan khusus untuk memenuhi adanya informasi tertentu. Laporan keuangan adalah hal yang paling esensial bagi pemilik usaha sebagai dasar untuk mengembangkan usaha mereka dalam hal pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya sebagian besar usaha, khususnya UMKM yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Hal tersebut timbul karena pemilik perusahaan berasumsi bahwa perusahaan mereka belum terlalu besar kegiatan operasinya.

UMKM Maharani belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar saja. Maharani yang terletak di D'wiga Regency A5 no 5, Malang Jawa Timur. UMKM tersebut mengalami keterbatasan dalam pengelolaan dan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pemilik perusahaan belum dapat mengelolah keuangan usaha secara benar dan sesuai dengan standar yang telah berlaku, sehingga operasional perusahaan tidak dapat terkontrol dengan baik. UMKM Maharani membutuhkan adanya format laporan keuangan yang bisa membantu dan mempermudah dalam laporan keuangan, dengan demikian pemilik dapat menilai usaha yang swelama ini ditekuni.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh “Maharani Embroidery” ?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang dapat diterapkan pada “Maharani Embroidery” ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menyusun pencacatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan “Maharani Embroidery “
2. Untuk penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang diterapkan pada “Maharani Embroidery “?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan laporan keuangan pada Maharani “Embroidery” yang bisa sesuai dengan SAK EMKM

2. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka pengembangan pengetahuan di dunia pendidikan dan pentingnya laporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM.